

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak bukanlah sesuatu yang asing lagi ditelinga kalangan umum, hampir semua golongan masyarakat mengetahui pajak. Dimana pajak bersifat paksaan, sehingga tidak heran jika gambaran yang mengerikan di benak masyarakat akan muncul ketika menyebut kata “Pajak”. Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara nonmigas (Resmi,2019). Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sector fiskal mendominasi penerimaan dalam APBN. Tanggung jawab atau pelaksanaan pemungutan pajak sebagai cermin kewajiban masyarakat itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Mardiasmo, 2019) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik.

Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Pajak sendiri dari warga negara

Indonesia dan menjadi salah satu iuran yang diwajibkan dan dapat dipaksakan penagihannya. Tanpa disadari pembangunan Nasional dan infrastruktur Indonesia dilakukan oleh masyarakat dan bersama pemerintah secara bersama-sama. Maka dari itu peran masyarakat disini harus dibutuhkan dengan pembiayaan pembangunan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak. Sebelum adanya *tax reform* (reformasi pajak) di Indonesia pembangunan nasional selalu bersumber dari dana yang sebagian besar berasal dari sektor minyak dan gas bumi namun setelah *tax reform* (reformasi pajak), pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dan menopong pembiayaan pembangunan nasional dalam kenyataannya penerimaan-penerimaan negara adalah penyumbang terbesar APBN.

APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu melalui APBN negara membuat rencana pendapatan dan belanja negara dalam kurun waktu satu tahun. Semua program kerja dan besarnya biaya dicatat disini yang mencakup seluruh daerah di wilayah Indonesia. Didalam APBN, dipilih atau diusulkan program panjang pembangunan pada sektor ekonomi juga mempengaruhi bidang-bidang lain dalam meningkatkan produktivitas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah sumber anggaran pendapatan daerah terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Bagian dana perimbangan
- 3) Pendapatan lain-lain yang sah

Pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan UU nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang dapat diperoleh diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dipungut berdasarkan peraturan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai perundang-undangan, kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam mendapatkan dana dari tingkat atas (subsidi). Usaha peningkatan pendapatan asli daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari tingkat atas (subsidi).

Upaya memaksimalkan usaha peningkatan pendapatan asli daerah dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian indonesia. pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh dan tambahan yang dapat digunakan untuk memperoleh dan tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Maka dari itu, peningkatan pendapatan merupakan hal yang mutlak yang diharapkan oleh setiap wilayah daerah.

Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi adalah dengan melakukan beberapa upaya yaitu pada sektor:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

PBBKB dipungut pajak atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor.

4. Pajak Air Permukaan (AP)

Dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan AP.

5. Pajak Rokok

Pajak rokok dikenakan terhadap cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Adapun Dasar Pungutan Pajak Daerah yakni :

- a) Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b) Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011
- c) Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman terhadap masyarakat, petugas pajak daerah dan setiap pihak yang berkaitan dengan pemungutan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak

dan retribusi daerah guna memberi keringatan dalam melakukan bea balik nama kendaraan bermotor, dan meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah kota Jambi memberikan program pemutihan kepada masyarakat. Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor Provinsi Jambi tahun 2023 ini dimulai pada tanggal 6 Januari hingga 6 April 2023.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor kota Jambi guna untuk membebaskan pembayaran denda dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, pembebasan sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor II 2023. Target pendapatan daerah Pemprov Jambi dari kegiatan ini mencapai Rp 120 miliar.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang, “ Mekanisme Bea Balik Nama Dan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor UPTD Samsat Kota Jambi”

1.2 Masalah pokok penulisan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, yang menjadi pokok permasalahan laporan ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor di kantor UPTD Samsat Kota Jambi?
2. Apa saja syarat-syarat bea balik nama kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penulisan dan Manfaat penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan masalah pokok laporan diatas muka tujuan dari penulis melakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor di kantor UPTD Samsat Kota Jambi
2. Untuk mengetahui apa saja syarat-syarat bea balik nama kendaraan bermotor

1.3.2 Manfaat penulisan

Adapun manfaat penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemilih Materi Laporan Tugas Akhir
 - a) Sebagai informasi dan bahan masukan serta menambah wawasan, pengetahuan dalam bidang Bea Balik Nama dan Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b) Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Diploma III Prodi Perpajakan
2. Bagi Instansi
 - a) Sebagai bahan masukan dalam upaya melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b) Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang bekerja.

1.4. Metode Penulisan Laporan

1.4.1 Jenis Data dan Sumber Data

Data yang diperoleh berasal dari hasil observasi yang berasal dari sumber yang terdiri dari:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber, (Sujarweni, 2016:89). Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara terstruktur dan Tanya jawab yang dilakukan penulis kepada pegawai Kantor UPTD Samsat Kota Jambi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan pemerintah, artikel, dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. (Sujarweni, 2016:89), yaitu bagaimana proses Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada pegawai Kantor Samsat Daerah Provinsi Jambi.

2. Metode *Browsing/Searching*

Metode *Browsing/Searching* adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan proses pencarian di dunia maya atau internet dalam mencari informasi pembuatan laporan tugas akhir.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu metode kepustakaan yang diperoleh dengan cara mencari referensi melalui perpustakaan maupun media internet.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Pelaksanaan magang dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu dari tanggal 08 Februari s/d 10 April 2023 dan tempat lokasi magang terdapat pada instansi Dinas UPTD PPD Samsat Kota Jambi yang beralamat di Jl. Gajah Mada, No. 23, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan akhir ini, akan dijabarkan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dan tujuan penulisan secara garis besar masing-masing bab mencakup hal-hal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulisan menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penelitian sehingga diharapkan dapat menggambarkan isi laporan secara garis besar.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori atau konsep yang berhubungan dengan judul dari hasil praktek magang yang digunakan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum di Dinas UPTD SAMSAT Kota Jambi yang meliputi sejarah singkat dan perkembangan Dinas UPTD SAMSAT Kota Jambi, visi dan misi, struktur organisasi, jumlah Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta menjawab tujuan dan rumusan masalah dari penulisan.

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulisan membahas tentang simpulan yang dapat ditarik dari hasil pengamatan dan saran-saran yang sesuai dalam pemaparan suatu simpulan.